

Kamis, 28 Januari 2021

1. Dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 'mirip kasus Jiwasraya', bukti 'lemahnya pengawasan OJK'

[Bbc.com](#) / 27-01-2021

Dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 'mirip kasus Jiwasraya', bukti 'lemahnya pengawasan OJK'

27 Januari 2021



Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Uthoh Banjar, mengatakan pihaknya menghormati proses penyelidikan di Kejaksaan Agung dan mengungkapkan azas praduga tak bersalah.

Terungkapnya dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp43 triliun disebut pengamat kian menegaskan lemahnya pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, kasus serupa juga terjadi pada dua perusahaan milik pemerintah lainnya, yakni Jiwasraya dan Asabri.

BPJS Ketenagakerjaan mengaku menghormati proses penyelidikan di Kejaksaan Agung, namun mengklaim pengelolaan dana investasinya dilakukan dengan kehati-hatian.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR meminta Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus ini.

BBC News Indonesia sudah beberapa kali menghubungi Ketua OJK, Wimboh Santoso melalui sambungan telepon dan pesan singkat, namun yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan.

Dua surat elektronik yang dikirim BBC News Indonesia ke humas@ojk.go.id juga tidak dibales.

- **Jiwasraya.** Kejanggalan sidik dugaan korupsi di bank bayar, potensi kerugian diperkirakan lebih dari Rp13,7 triliun
- **Asabri.** Kerugian investasi Rp10 triliun, pemerintah harus waspada dampak sistemik, kalsi pengamat
- **Jiwasraya.** Dari gagal bayar klaim triliunan rupiah hingga dugaan tindakan curang

Apa yang dikatakan pengamat asuransi?

Pengamat asuransi, Ivan Rahardjo, mengatakan jika bersandar pada penjelasan Kejaksaan Agung yang menyebut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mirip dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya, maka semakin menguatkan lemahnya pengawasan oleh lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Padahal, katanya, pengawasan investasi saham yang dilakukan perusahaan pelat merah sudah menjadi tanggung jawab OJK.

Pada kasus Asabri, sambung Ivan, OJK tidak melakukan apa-apa terhadap laporan keuangan yang diserahkan perusahaan tersebut.

Begitu pula terhadap Jiwasraya yang dianggap tidak cepat dan tegas sehingga berbuntut pada gagal bayar klaim pada tahun 2018 silam.

"Seperti kasus Asabri, dikatakan tidak di bawah OJK kenyataannya Asabri membayar iuran OJK dan melapor ke OJK tapi OJK tidak melakukan apa-apa dengan laporan-laporan yang dibuat Asabri.

"Jadi ini soal pengawasan dan penegakan sanksi," ujar Ivan Rahardjo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (20/01).



Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 20 orang sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi investasi BPJS Ketenagakerjaan.

Selain masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan milik negara kerap tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya atau fiktif, kata Ivan.

Hal itu nampak pada laporan Jiwasraya, di mana setelah dilakukan audit mengalami kekurangan cadangan premi karena tidak memperhitungkan penurunan aset, paparnya.

Hal lain, sambungnya, demi mendapat keuntungan besar perusahaan asuransi terjerak pada saham-saham lapis ketiga yang memiliki fundamental kurang baik, ditambah lagi dengan pemilihan produk reksadana yang berkinerja negatif.

"Tidak memakai protokol investasi yang baik, menanamkan saham pada saham lapis dua atau tiga yang sangat fluktuatif," imbuhnya.

Ketua OJK, Wimboh Santoso, tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan BBC Indonesia. Dua surat elektronik yang dikirim ke humas@ojk.go.id juga tidak dibales.

Apa langkah hukum Kejaksaan?

Adapun Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 20 orang sebagai saksi.

Mereka di antaranya JHT yang merupakan Presdir PT Ciptadana Sekuritas, PS adalah Presdir BNP Paribas Asset Management, KBW selaku Deputi Direksi Pasar Modal Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan, dan SM sebagai Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Kejagung memeriksa para saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/F.276/201/2021, kata salah-seorang pejabatnya.

"BPJS saat ini masih kita lihat karena transaksinya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai Rp43 triliun sekian di reksadana dan saham," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrin Ardianayah, Selasa (19/01).



Dana BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp43 triliun.

Dugaan korupsi akan menyebabkan ketidakpercayaan

Mencuatnya kasus ini, kata Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, bakal menimbulkan ketidakpercayaan bagi peserta yakni pekerja.

Karena itu, ia meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan jujur dan membuka data investasi sahamnya kepada publik agar kepercayaan peserta terhadap perusahaan terjaga.

Sebab, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp486 triliun.

"Jadi memang terbuka kalau terbukti ada kerugian investasi ya kalangan pekerja akan mengatakan, 'kok pengelolaan uang buruh tidak dikerjakan dengan profesional. Artinya muncul ketidakpercayaan,'" kata Timboel Siregar kepada BBC News Indonesia.

Namun begitu, sejauh pengamatannya, mayoritas saham yang dibeli BPJS Ketenagakerjaan memiliki fundamental yang baik atau masuk kategori LQ45.

Kendati dari 25 saham tersebut, sembilan di antaranya belakangan terpental dari LQ45 karena harganya jatuh.

Tapi meski harganya turun belum terjadi kerugian lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan "cut loss" atau menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga beli.

"Ibu namanya unreal loss dan hal biasa, dulu beli harga Rp10.000, sekarang turun. Tapi itu belum loss kalau belum tematisasikan," ujar Timboel Siregar.

Tindakan korupsi, menurutnya, bisa muncul kalau ada "persetujuan di bawah meja" antara pemilik saham dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan agar membeli saham tertentu demi mengerek harga.

"Misalnya nih perusahaan kategori LQ45 dalam rangka menaikkan sahamnya, minta BPJS beli sahamnya, supaya masyarakat lihat sahamnya bagus dan mengerek harga.

"Ibu bisa terjadi tapi harus benar-benar diperiksa dari sisi analisa. Apalagi asal-asalan, kalau ada motif begitu ya salah BPJS," ungkapnya.



Mencuatnya kasus ini, kata Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, bakal menimbulkan ketidakpercayaan bagi peserta yakni pekerja.

Ia pun berharap ke depan, pemerintah dan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dengan latarbelakang beragam yakni tidak hanya diisi orang perbankan tapi juga pasar modal.

Sehingga pengawasan menjadi lebih ketat.

"Kita butuh orang pasar modal untuk mengawasi investasi saham dan reksadana. Yang ada saat ini enggak ada orang pasar modal, cuma cusp-cusp doang."

Apa kata BPJS Ketenagakerjaan?

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Uthoh Banjar, mengatakan pihaknya menghormati proses penyelidikan di Kejaksaan Agung dan mengungkapkan azas praduga tak bersalah.

"Kami siap memberikan keterangan secara transparan untuk memastikan apakah pengelolaan investasi sudah sesuai dengan ketentuan," ujar Uthoh kepada BBC News Indonesia.

Kata dia, dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2020 mencapai Rp486,36 triliun.

Dalam pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan, klaimnya, selalu mengutamakan aspek kepatuhan dan kehati-hatian.

Sepanjang tahun 2020, hasil investasi dari lima jenis seperti surat utang, saham, deposito, reksadana, dan investasi langsung mencapai Rp32,30 triliun.

Namun demikian, investasi terbesar dalam bentuk Surat Utang sebesar 64%, sisanya adalah Saham 17%, Deposito 10%, Reksadana 8% dan investasi langsung 1%.

Khusus untuk investasi saham, ia mengaku, ditempatkan pada saham dengan kategori LQ45 yang artinya memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

"Kualitas aset investasi BPJS sangat baik, terlihat per 31 Desember 2020 sebanyak 98% dari portofolio saham ditempatkan pada saham kategori LQ45."



Sepanjang tahun 2020, hasil investasi dari lima jenis seperti surat utang, saham, deposito, reksadana, dan investasi langsung yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp32,30 triliun.

'Harus jadi pelajaran'

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayat, berharap Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut. Sebab ia menduga penyelenggaraan dana investasi ini sudah berlangsung lama.

Dalam beberapa kali rapat pun, ia telah mengingatkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar berhati-hati dalam mengelola dana buruh.

"Kita sudah warning berkali-kali sejak ada kasus Jiwasraya dan Asabri dapat setiap rapat dengan Direksi. Karena itu adalah uang pekerja, hak pekerja yang saat pensiun yang dipotong dan dititipkan ke BPJS," ujar Kurniasih Mufidayat kepada BBC News Indonesia.

Mencuatnya kasus ini, juga akan dijadikan pijakan DPR dalam memilih calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sehingga lebih ketat.

Menurutnya, permasalahan ini tidak akan terjadi jika Dewan Pengawas bekerja dengan teliti.

"Saat fit and proper test Dewan Pengawas dan pasti akan jadi satu kriteria khusus untuk Dewan yang fungsinya mengawasi jangan sampai ada pemberian."

"Kita harap kasus ini jadi pelajaran."

2. **Jaksa Agung Sebut Korupsi BPJS TK Tak Terkait Kasus Jiwasraya**
Cnnindonesia.com / 27-01-2021

Jaksa Agung Sebut Korupsi BPJS TK Tak Terkait Kasus Jiwasraya

CNN Indonesia | Selasa, 26/01/2021 23:47 WIB

Bagikan :  



Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tidak berhubungan dengan penanganan kasus korupsi Jiwasraya. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta, CNN Indonesia -- **Jaksa Agung** Sanitiar Burhanuddin menyatakan kasus dugaan korupsi di PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**BPJS**) Ketenagakerjaan tidak berhubungan dengan penanganan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin merespons pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (26/1).

"Apa BPJS Ketenagakerjaan ada kaitannya dengan Jiwasraya? Tidak. BPJS kasusnya berdiri sendiri dan ini masih dalam penyidikan awal," ucap Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pihaknya sudah memeriksa 20 orang terkait kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar terkait penetapan tersangka dalam kasus ini.

"Mohon bersabar untuk penentuan tersangkanya," tutur dia.

Sebelumnya, Tobas--sapaan akrab Taufik Basari--bertanya apakah kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan memiliki hubungan dengan kasus korupsi Jiwasraya.

Ia meminta Burhanuddin melakukan pengembangan penyidikan apabila dua kasus tersebut memiliki hubungan.

"Dari kasus BPJS, apa ada kaitannya dengan Jiwasraya? Kalau ada, ini bisa pengembangan. Walaupun kasus Jiwasraya dianggap selesai, tapi upaya untuk menelusuri dengan kasus lain itu bisa dilakukan dengan sangat baik," tutur Tobas.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono meyakini bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi ini serupa dengan yang terjadi pada Jiwasraya kala itu.

"Hampir sama dengan Jiwasraya, itu kan investasi juga. Dia [perusahaan] punya duit, investasi keluar," kata Ali kepada wartawan.

Penyidik pun telah memeriksa dua direktur di BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi di perusahaan itu.

Sebelumnya, penyidik juga sudah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah dokumen diamankan. Penanganan kasus itu berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

(mts/pmg)

3. Kasus Penggelapan AJB Bumiputera, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
[Detik.com](https://www.detik.com) / 27-01-2021

Kasus Penggelapan AJB Bumiputera, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Yulida Medistiara - detikNews

Rabu, 27 Jan 2021 15:51 WIB

0 komentar

SHARE   



Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menerima pelimpahan tahap II tersangka kasus dugaan penggelapan AJB Bumiputera 1912. Para tersangka dan barang buktinya dilimpahkan dari penyidik OJK.

"Dilimpahkan dari penyidik OJK kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kasi Intel Kejari Jaksel Odit Megoondo, saat dikonfirmasi, Rabu (27/1/2020).

Odit menjelaskan pelimpahan tahap II itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB di Kejari Jaksel. Adapun tiga tersangka yang dilimpahkan merupakan mantan pejabat AJB Bumiputera 1912, di antaranya mantan Chief Marketing Officer pada AJB Bumiputera 1912 tahun 2013 Agustiar Hendro, Mantan Kabag Teknik AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pematang Siantar Muhammad Joni Nasution, serta karyawan swasta Yon Maryono bin Wagiman Harto Miharjo.

Para tersangka melakukan tindak pidana perasuransian berupa penggelapan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan/atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan perusahaan asuransi jiwa dan/atau menerima, menadahi, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan perusahaan asuransi jiwa.

Kasus tersebut terkait dengan Keputusan Direksi AJB Bumiputra 1912 periode tahun 2013 dalam pemberian persetujuan biaya apresiasi agen sebesar Rp. 8.478.564.447 kepada pegawai dan/atau karyawan (Tim Negosiasi) dan/atau pihak lain melalui 2 orang agen. Seolah-olah biaya apresiasi diperuntukkan kepada para agen sebagai keberhasilan pelaksanaan switching/pertukaran produk kesejahteraan karyawan (PPK) dengan Produk MITRA SAVE pada ASKUM PT. BSRE yang terjadi di AJB Bumiputra 1912.

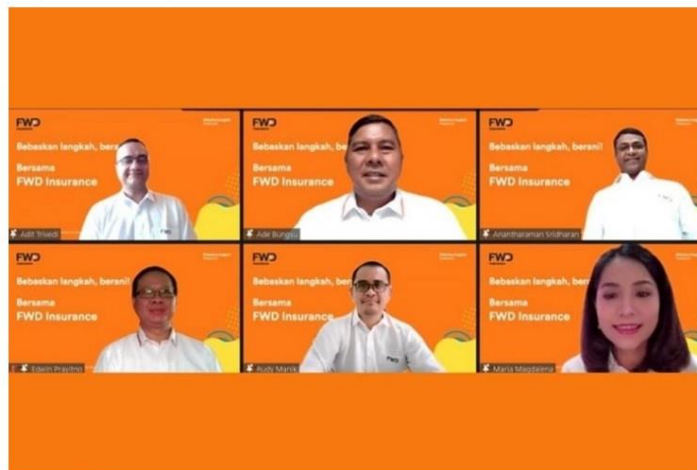
Atas perbuatannya para tersangka disangkakan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU no. 2 Tahun 1992 Jo. UU no 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian Jo. 55 KUHP.

(yld/hri)

4. Sah, PT FWD Life Indonesia dan PT FWD Insurance Indonesia Akhirnya Merger
[Kompas.com](https://www.kompas.com) / 27-01-2021

Sah, PT FWD Life Indonesia dan PT FWD Insurance Indonesia Akhirnya Merger

Kompas.com - 27/01/2021, 12:57 WIB



Ilustrasi: Dok. FWD Insurance

KOMPAS.com - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT FWD Insurance Indonesia telah menuntaskan proses penggabungan atau merger. Kedua entitas tersebut kini melebur yang selanjutnya disebut PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

Sebagai informasi, proses merger tersebut dimulai sejak FWD Life secara resmi mengakuisisi PT Commonwealth Life pada Senin (8/6/2020). Perusahaan yang telah berdiri di Indonesia sejak 1993 tersebut kemudian di-rebranding menjadi PT FWD Insurance Indonesia.

Penggabungan dua entitas itu diklaim memperkuat fondasi FWD Insurance dalam melanjutkan bisnisnya di Indonesia yang telah berjalan selama 28 tahun.

Setelah melebur, FWD Insurance akan menghadirkan pengalaman yang berbeda dengan berbagai produk yang mudah dipahami dan berfokus pada nasabah.

Hal itu dilakukan dengan didukung teknologi digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin melek teknologi.

CEO FWD Group Huynh Thanh Phong mengatakan, sejak masuk Indonesia, FWD telah membangun brand asuransi yang segar dan dinamis dalam waktu singkat.

"Penggabungan ini merupakan bukti keyakinan kami yang kuat terhadap potensi pasar asuransi Indonesia dalam jangka panjang," ujar Phong dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Phong berharap, FWD Insurance dapat terus meraih kesuksesan serta berupaya mengubah paradigma masyarakat di Indonesia tentang asuransi.

Sementara itu, Direktur Utama FWD Insurance Anantharaman Sridharan mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki, yakni teknologi digital, jaringan layanan yang luas, dan basis nasabah yang kuat, FWD Insurance mampu meningkatkan layanan kepada nasabah dalam berasuransi.

"Sebagai satu kesatuan, kami akan dengan mudah menghadapi tantangan serta berupaya mendobrak stigma lama serta menjadikan asuransi lebih sederhana dengan proses yang lebih cepat dan mudah. Kami berkomitmen membuat asuransi lebih mudah diakses bagi semua masyarakat," terangnya.

Usai penggabungan, seluruh polis FWD Life dan FWD Insurance beserta syarat, ketentuan, dan manfaatnya tetap sama.

Nasabah dapat terus mengakses produk dan layanan perusahaan melalui saluran layanan pilihan mereka. Di sisi lain, beberapa nama produk akan berubah seiring perubahan nama perusahaan.

Adapun penggabungan dua entitas bisnis tersebut menandai peluncuran kampanye Everyday Heroes dari FWD Insurance di Indonesia.

Kampanye tersebut mendorong setiap orang untuk menjadi pahlawan dalam hidup mereka dan berani membuat keputusan yang berdampak besar dalam hidup mereka. Kampanye ini mencerminkan filosofi FWD Insurance yang meyakini bahwa asuransi harus menjadi sumber kekuatan.

"Kami ingin menginspirasi semua orang untuk berani menghadapi perubahan dan tantangan, melangkah pasti dalam menjalankan cerita mereka sendiri, dan merayakan hidup tanpa ragu. (Ini) yang kami sebut Bebasan Langkah, Berani!" tambahnya.

TAG: [nasabah](#) [asuransi](#) [Life](#) [insurance indonesia](#) [insurance](#)

5. **Melebihi Jiwasraya, kerugian korupsi Asabri capai Rp 22 triliun**
[Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 27-01-2021

Melebihi Jiwasraya, kerugian korupsi Asabri capai Rp 22 triliun

Rabu, 27 Januari 2021 / 16:03 WIB



ILUSTRASI: Jaksa Agung Burhanuddin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kasus Jiwasraya, kini negara kembali dirugikan akibat dugaan korupsi di Asabri. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, kerugian negara akibat kasus Asabri mencapai Rp 22 triliun. Nilai lebih tinggi dibandingkan kasus korupsi Jiwasraya Rp 16,8 triliun.

"Jadi hasil perhitungan (kerugian negara) di BPKP itu Rp 17 triliun, tapi kami menggunakan BPK Rp 22 triliun. Ini yang menjadi fokus perhatian kami," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (26/1).

Kerugian itu terjadi karena kesalahan pengelolaan investasi Asabri pada periode 2012-2019. Kejaksaan juga telah memeriksa 18 orang saksi serta tujuh calon tersangka namun ia belum dapat mengungkapkan siapa saja mereka. Kasus ini masih terus berkembang karena masih tahap pendalaman.

"Kasus Asabri dan Jiwasraya memang ada dua yang sama (tersangka). Ini memang ada tujuh calon tersangka, tapi bisa lebih lagi," lanjutnya.

Dari dua tersangka yang sama itu, Kejaksaan sudah menyita aset mereka lebih dulu untuk kasus Jiwasraya. Setelah itu, penyidik masih memburu lagi aset dari keduanya untuk menutupi kerugian negara akibat kasus Asabri.

"Dua yang sama ini, asetnya masih ada. Jadi kami akan cari terus walau mungkin akan berat karena kerugian Asabri di atas Jiwasraya," terangnya.

Dengan besarnya nilai kerugian itu, Komisi III DPR berencana kembali memanggil jajaran Kejagung untuk membahas kasus Asabri pada Panja Penegakan Hukum. Diperkirakan, yang akan datang adalah Jaksa Agung atau diwakili oleh Jampidsus.

"Kalau bisa, kasus ini diekspos di sini (DPR) karena ini kasus dahsyat abad ini. Saya akan mendukung secara penuh," kata anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman.

Perkembangan kasus ini juga menjadi perhatian jajaran direksi Asabri. Direktur Investasi Asabri Jeffry Haryadi P. Manullang mengungkapkan, sebagai manajemen perusahaan negara dan warga negara, tentu pihaknya akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kami juga memantau perkembangannya dengan tujuan untuk menindaklanjuti hal-hal yang memang perlu kami lakukan dan antisipasi dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan," ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, perkembangan kasus ini dinilai tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta dan *stakeholder* walau kejaksaan tengah meminta keterangan saksi baik dari karyawan maupun mantan pejabat Asabri.

6. FWD Life Indonesia dan FWD Insurance Indonesia Resmi Melebur [Liputan6.com](https://liputan6.com) / 27-01-2021

Home > On Off

FWD Life Indonesia dan FWD Insurance



Setelah menjalani proses penggabungan, PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT FWD Insurance Indonesia telah resmi bergabung. Kini keduanya berada dalam satu payung yaitu PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan **asuransi**, PT FWD Life Indonesia (FWD Life) dan PT FWD Insurance Indonesia resmi menyelesaikan proses penggabungan. Merger kedua entitas menjadi satu ini selanjutnya disebut PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

"FWD telah membangun brandasuransi yang fresh dan dinamis hanya dalam beberapa tahun yang singkat sejak masuk ke Indonesia. Penggabungan ini merupakan bukti keyakinan kami yang kuat terhadap potensipasar asuransi Indonesia dalam jangka panjang. Kami berharap dapat terus meraih kesuksesan bersama dan secara bersamaan berupaya mengubah cara pandang masyarakattentang asuransi di Indonesia," ujar Huynh Thanh Phong, CEO FWD Group dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Pada tahun 2020, FWD Life mengakuisisi dan melakukan rebranding PT Commonwealth Life(PTCL) yang telah berdiri di Indonesia pada tahun 1993. Penggabungan dari FWD Life danFWD Insurance akan memperkuat fondasi bagi FWD Insurance untuk melanjutkan operasional di Indonesia.

FWD Insurance dikatakan akan menawarkan berbagai produk yang mudah dipahami dan berfokus pada nasabah yang didukung oleh teknologi digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin paham teknologi.

Direktur Utama FWD Insurance Anantharaman Sridharan, menambahkan jika penggabungan kekuatan ini dilakukan, melalui pendekatan yang fresh dan didukung oleh teknologi digital serta jaringan layanan yang luas dan basis nasabah yang kuat.

"Kami siap melayani nasabahdan meningkatkan pengalaman berasuransi mereka. Sebagai satu kesatuan, kami akan dengan mudah beradaptasi dalam menghadapi tantangan serta terus berupaya mendobrakstigma lama dan membuat asuransi lebih sederhana dengan proses yang lebih cepat danmudah.

Nasabah



(c) FWD

Dia memastikan jika semua polis FWD Life dan FWD Insurance beserta syarat, ketentuan, dan manfaatnya tetap sama. Nasabah dapat terus mengakses produk dan layanan perusahaan melalui saluran layanan pilihan mereka.

Beberapa nama produk akan berubah mengikuti perubahan nama perusahaan. Pencapaian ini sekaligus menandai peluncuran kampanye Everyday Heroes di Indonesia.

"Kami ingin menginspirasi semua orang untuk berani menghadapi perubahan dan tantangan,melangkah pasti dalam menjalankan cerita mereka sendiri, dan merayakan hidup tanpa ragu,atau yang kami sebut Bebasan Langkah, Berani!," tambah Anantharaman.

Asuransi FWD Life Indonesia FWD Insurance Indonesia

7. Terungkap Kasus Korupsi AJB Bumiputera
[Okezone.com](https://okezone.com) / 27-01-2021

HOME // ECONOMY // HOT ISSUE

Terungkap Kasus Korupsi AJB Bumiputera

Alya Ramadhanti, Jurnalis · Rabu 27 Januari 2021 05:10 WIB



Korupsi (Ilustrasi: Shutterstock)



A A A

JAKARTA – Kasus korupsi perusahaan asuransi Indonesia kembali terungkap, kali ini korupsi di perusahaan **AJB Bumiputera** 1912. Beberapa mantan pejabat Bumiputera dikabarkan masuk tahanan dan sebagian lagi masih masa persidangan.

Asisten Direktur Pemasaran Bumiputera Jaka Irwanta memberikan kabar bahwa sejak pekan lalu setidaknya terdapat tiga mantan pejabat Bumiputera yang ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Sudah ada enam pejabat yang ditahan Kejari Jaksel. Masih berlanjut gugatan lainnya. Penggugat dari penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Siapa pun yang korupsi di Bumiputera akan dipenjara," ujar Jaka hari ini di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Jaka membeberkan nama mantan pejabat yang ditahan yaitu Mantan Direktur Teknik dan Aktuaria (2013) Mohammad Irsyad, Mantan Kepala Divisi Syariah (2011) Yon Maryono, Mantan Chief Marketing Officer (2013) Agustiar Hendro, dan Kepala Bagian Aktuaria Hendro.

Baca selengkapnya: [Korupsi Asuransi Bumiputera Kembali Terungkap](#)

Lihat juga: [Rekomendasi Game Terbaik Untuk Libur Panjang Anak \(kmj\)](#)

#asuransi #industri asuransi #AJB Bumiputera #korupsi

8. Jiwasraya Jadi Model Penyelamatan Polis Asuransi [Republika.co.id](https://republika.co.id) / 27-01-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

Jiwasraya Jadi Model Penyelamatan Polis Asuransi

Rabu 27 Jan 2021 23:21 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah



Ilustrasi asuransi jiwa - Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Foto: Antara/Galih Pradipta

Restrukturisasi Jiwasraya bisa diadopsi untuk selesaikan masalah gagal bayar asuransi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menilai restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menjadi model penyelamatan polis asuransi nasional yang bisa diadopsi untuk menyelesaikan masalah **gagal bayar asuransi** yang saat ini terjadi. Penyelesaian gagal bayar Jiwasraya saat ini sudah memiliki titik terang ketimbang perusahaan yang lain.

Toto mengatakan opsi restrukturisasi dengan memindahkan eks pemegang polis yang setuju ke Indonesia Financial Group (IFG) Life, anak usaha IFG sebelumnya bernama PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (BPUI) merupakan pilihan terbaik ketimbang opsi likuidasi.

"Nanti eks pemegang polisnya (yang setuju) dipindahkan ke IFG Life menurut saya akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada pemegang polis dibandingkan opsi likuidasi Jiwasraya," ujar Toto saat dihubungi *Republika* di Jakarta, Rabu (27/1).

Toto mengatakan hal ini tak lepas dari posisi IFG Life sebagai entitas bisnis baru yang akan mendapat suntikan dana pemerintah sebesar Rp 22 triliun dan suntikan induknya yaitu IFG hampir Rp 4 triliun. Toto menilai modal ini akan cukup signifikan saat IFG Life beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa yang baru.

"Mereka akan lepas dari bayang-bayang reputasi buruk Jiwasraya sebelumnya dan IFG Life bisa beroperasi untuk menangani captive market seperti BUMN, kementerian, dan lembaga, serta segmen market lainnya," ucap Toto.

Toto menyampaikan apabila pola ini berjalan mulus, tingkat *return* atau keuntungan yang didapat bisa digunakan untuk mulai membayar polis eks Jiwasraya sesuai tenor waktu yang telah disepakati. Dengan cara ini kemungkinan pemegang polis eks Jiwasraya masih bisa memulihkan investasinya 70 persen sampai 80 persen.

"Prinsipnya mereka sabar dengan tenor waktu yang sudah disepakati pascarestrukturisasi ini," kata Toto menambahkan.

9. FWD Insurance Siap Tingkatkan Layanan Asuransi Nasabah [Suara.com](#) / 27-01-2021

BISNIS / Makro / Keuangan / Properti / Inspiratif

FWD Insurance Siap Tingkatkan Layanan Asuransi Nasabah

Iwan Supriyatna

Rabu, 27 Januari 2021 | 15:13 WIB



Suara.com - PT **FWD Life** Indonesia (FWD Life) dan PT **FWD Insurance** Indonesia telah menyelesaikan proses penggabungan yang membawa kedua entitas menjadi satu yang selanjutnya disebut PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance).

Pada tahun 2020, FWD Life mengakuisisi dan melakukan rebranding PT Commonwealth Life (PTCL) yang telah berdiri di Indonesia pada tahun 1993.

Penggabungan dari FWD Life dan FWD Insurance akan memperkuat fondasi bagi FWD Insurance untuk melanjutkan pengalamannya selama 28 tahun di Indonesia.

FWD Insurance akan menghadirkan pengalaman yang berbeda dengan berbagai produk yang mudah dipahami dan berfokus pada nasabah yang didukung oleh teknologi digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin paham teknologi.

"FWD telah membangun brand **asuransi** yang fresh dan dinamis hanya dalam beberapa tahun yang singkat sejak masuk ke Indonesia. Penggabungan ini merupakan bukti keyakinan kami yang kuat terhadap potensi pasar asuransi Indonesia dalam jangka panjang. Kami berharap dapat terus meraih kesuksesan bersama dan secara bersamaan berupaya mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di Indonesia," kata Huynh Thanh Phong, CEO FWD Group dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).

Direktur Utama FWD Insurance, Anantharaman Sridharan menambahkan, dengan gabungan kekuatan, yaitu pendekatan yang fresh dan didukung oleh teknologi digital serta jaringan layanan yang luas dan basis nasabah yang kuat, FWD Insurance siap melayani nasabah dan meningkatkan pengalaman berasuransi mereka.

"Sebagai satu kesatuan, kami akan dengan mudah beradaptasi dalam menghadapi tantangan serta terus berupaya mendobrak stigma lama dan membuat asuransi lebih sederhana dengan proses yang lebih cepat dan mudah. Kami berkomitmen untuk terus membuat asuransi lebih mudah diakses bagi semua masyarakat Indonesia," kata Anantharaman.

Semua polis FWD Life dan FWD Insurance beserta syarat, ketentuan, dan manfaatnya tetap sama. Nasabah dapat terus mengakses produk dan layanan perusahaan melalui saluran layanan pilihan mereka. Beberapa nama produk akan berubah mengikuti perubahan nama perusahaan.

Pencapaian ini sekaligus menandai peluncuran kampanye Everyday Heroes di Indonesia. Kampanye ini mendorong setiap orang untuk menjadi pahlawan dalam hidup mereka dan berani membuat keputusan yang berdampak besar dalam hidup mereka.

Kampanye ini mencerminkan filosofi FWD Insurance yang meyakini bahwa asuransi harus menjadi sumber kekuatan.

"Kami ingin menginspirasi semua orang untuk berani menghadapi perubahan dan tantangan, melangkah pasti dalam menjalankan cerita mereka sendiri, dan merayakan hidup tanpa ragu, atau yang kami sebut Bebaskan Langkah, Berani!" tambah Anantharaman.